

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejumlah pengamat memperkirakan dalam periode 2011 hingga 2016 bakal banyak wisatawan asing yang datang ke Asia Pasifik. Sebagai negara yang direkomendasikan untuk dikunjungi adalah Indonesia. Hal tersebut di jelaskan berdasarkan survei *Pacific Asia Travel Association* (PATA) Asia Pasifik. Sementara itu Menurut BPS, selama Januari-Juli jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia mencapai 4,764,864 orang. Jumlah ini naik 1,83 % dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu pada tahun 2015 jumlah wisatawan sebanyak 7,903,498 dengan pertumbuhan 0,06%. (Kemenpar, 2016). Naiknya jumlah wisatawan mancanegara menjadi indikasi Indonesia aman untuk dikunjungi. Industri pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar ketiga dalam negeri kita.

Pada tahun 2015 kunjungan wisatawan ke Kabupaten Natuna mencapai 217.620 pengunjung, naik dari tahun sebelumnya 2014 sebanyak 200.556 pengunjung. Dibandingkan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Natuna termasuk salah satu kabupaten yang banyak dikunjungi di Kabupaten Tanjungpinang jumlah wisatawan hanya 8.236 pada tahun 2015, sementara Kabupaten yang paling banyak dikunjungi adalah Batam yaitu sebanyak 357.927 pengunjung pada tahun 2015 (BPS Natuna, 2015)

Keberadaan sektor pariwisata dalam suatu wilayah dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Namun, pada dasarnya tergantung pada

manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dari unsur pemerintah-industri masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Pencapaian tujuan dan misi pembangunan kepariwisataan yang baik, berkelanjutan (*sustainable tourism*) dan berwawasan lingkungan hanya akan dapat terlaksana manakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui tata kelola kepariwisataan yang baik (*good tourism governance*) (Yoeti, 2006:140).

Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisatanya. Dari transaksi itulah masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta negara akan mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah (UU Pariwisata, 2009).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan

bangsa, mempererat persahabatan antarbangsa. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 33 tahun 2009 Tentang Pedoman pengembangan ekowisata di daerah, yang dimaksud dengan ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Saat ini sektor pariwisata di Indonesia belum berjalan secara optimal padahal aspek ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan devisa negara, pendapatan masyarakat, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) (UU Pariwisata, 2009)

Berdasarkan Undang-Undang tersebut menjadi jelas pembangunan pariwisata terutama ditujukan untuk masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mampu bersaing di era perubahan serta mampu memelihara nilai-nilai agama dan kelestarian budaya lokal atau daerah. Saat ini berbagai potensi wisata di daerah-daerah terus dikembangkan dan dipromosikan mengingat di era otonomi daerah sekarang yang menekankan perlunya kebijakan masing-masing daerah berdasarkan nilai-nilai kearifan lokalnya, apabila potensi-potensi wisata tersebut dikembangkan dengan baik dan berkesinambungan maka akan memajukan wisata nasional yang akan menjadikan Indonesia negara yang kaya pariwisata.

Pariwisata secara umum merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu

perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Pitana, 2009:32)

Kabupaten Natuna, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat (Profil Kabupaten Natuna, 2015)

Kabupaten Natuna merupakan daerah yang memiliki banyak potensi kepariwisataan dari Sumber Daya Alam (SDA), hingga seni dan budaya serta kuliner. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Salah satu potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna adalah wisata alam diantaranya pantai Setai, pantai Cemaga, Pulau Senoa, Batu Catur, pantai Pasir Marus, air terjun gunung Hiu, pahatan alam tanjung Datuk dan pantai sisi. Selain itu terdapat beberapa wisata budaya diantaranya Mendu Natuna, tari ayam Sobur, kompiang dan kesenian alu. Sedangkan wisata kuliner yang makanan menjadi khas Natuna adalah Kernas dan Lempar (Profil Kabupaten Natuna, 2015)

Potensi-potensi inilah yang harus secara terus menerus ditingkatkan melalui peran khusus dari Pemerintah yang diemban oleh Dinas Pariwisata. Oleh karena itu perlu adanya upaya nyata Pemerintah dalam meningkatkan daya tarik objek wisata bahari secara optimal yaitu melalui penyelenggaraan Kegiatan kepariwisataan. Tanggung jawab pemerintah dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) dikawasan objek wisata tertuang dalam peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2011 pasal 5 diuraikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap : Pembangunan daya tarik wisata, pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pembangunan aksesibilitas dan atau transportasi dan pemberdayaan masyarakat.

Program yang dilaksanakan di kawasan wisata diatas bertujuan untuk memperkenalkan Kabupaten Natuna dan potensi wisatanya kepada wisatawan yang berkunjung melalui media masyarakat sebagai pelakunya. Posisi masyarakat sangatlah penting karena pariwisata dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk berkembang melalui kegiatan ekowisata, sehingga potensi manusia dapat diberdayakan dengan baik dan tidak lagi menjadi penonton melainkan dapat berinteraksi secara langsung dengan wisatawan mancanegara yang berkunjung. Program itulah yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna sebagai implementasi tujuan awal pemerintahan yaitu sebagai wujud hubungan antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat (Widjaja, 2007:34)

Pitana (2009:123), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai *Motivator*, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan kedua peran sebagai *fasilitator*, sebagai fasilitator pengembangan potensi. Ketiga peran sebagai *Dinamisor*, dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

Selanjutnya Menurut Nugroho (2011:133), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengoptimalan peran pemerintah diantaranya ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, kemitraan (*Partnership*) dan peran serta masyarakat (*Participation*) dalam rangka mengoptimalkan peran dari pemerintah, maka peran serta masyarakat perlu menjadi sorotan utama, karena masyarakat merupakan subjek dan objek dari kebijakan. Faktor tersebut menjadi hal penting yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata.

Dampak positif pengembangan kepariwisataan salah satunya yaitu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dapat berasal dari banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung maupun menginap di lokasi wisata. Wisatawan merupakan unsur terpenting untuk berkembangnya suatu objek dan daya tarik kepariwisataan. Dengan tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di Kabupaten Natuna otomatis

mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat dan usaha-usaha pariwisata (Widjaja, 2007:45).

Sebagai kawasan objek wisata yang cukup produktif dan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat, Peran pemerintah juga diperlukan dalam memberikan klasifikasi, pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam kegiatan ekowisata masyarakat, diharapkan dengan adanya kegiatan ekowisata dapat menunjang meningkatkan ekonomi masyarakat, dan keterampilan masyarakat dan usaha pariwisata yang berdiri di kawasan objek wisata pantai, usaha pariwisata merupakan komponen yang sangat penting selain sebagai penunjang dan promosi produk wisata, usaha pariwisata juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal (Nugroho, 2011:22)

Melihat bahwa Kabupaten Natuna memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang masih asli dengan keadaan alam dan budayanya, perkembangan ekowisata akan terus meningkat seiring terus berkembang dan meningkatnya usaha pariwisata. Potensi tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian, memajukan kebudayaan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Terutama dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah menjadi memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola daerahnya tanpa proses birokrasi yang cukup lama ke pemerintah pusat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna tentunya telah mempunyai tugas dan fungsinya yang harus dilaksanakan untuk pengembangan lokasi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Natuna. Namun berbagai permasalahan selalu muncul diantaranya,

masih minimnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepariwisataan dilokasi wisata, seperti kebersihan, kenyamanan, pelayanan, pada fasilitas pariwisata. Kemampuan Pemerintah dalam meningkatkan seni dan budaya dengan mempertahankan kondisi keanekaragamam pariwisata seperti atraksi budaya yang berwawasan alam, kerajinan, serta adat istiadat, guna meningkatkan jumlah wisatawan masih begitu mimin, masyarakat belum sepenuhnya diberdayakan sebagai salah satu pendukung kepariwisataan. Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka berbagai peneliti tertarik mengetahui tentang peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna dalam pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Natuna.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Natuna Tahun 2015?*
- 2. Bagaimana tatakelola pariwisata di Kabupaten Natuna?*
- 3. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Natuna?*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Natuna Tahun 2015
2. Mengetahui tatakelola pariwisata di Kabupaten Natuna
3. Faktor yang mendukung dan penghambat Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Natuna

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya agar dapat meningkatkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah masing-masing.

Bagi masyarakat di Kabupaten Natuna hasil penelitian ini dapat dijadikan motivasi untuk bersama-sama dengan pemerintah mengembangkan ekowisata sehingga.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama

E. Kerangka Dasar Teori

1. Peran

a. Pengertian peran

Peran organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Peran organisasi dalam sangatlah penting, karena perusahaan atau lembaga didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan aktifitas, kerja sama, dan tentu saja orang yang melakukan aktifitas tersebut atau sumber daya manusia yang ketiga unsur ini terdapat dalam sebuah organisasi. Kesimpulannya, suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu membutuhkan organisasi didalamnya agar bisa tercapai tujuan tersebut (Soerjono, 2005:170).

Sedangkan menurut Poerwodarminta (2003:107) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwodarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat

b. Peran Dinas Pariwisata

Menurut Widjaja (2007:47) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengatur mengenai Dinas yaitu:

- 1) Dinas Daerah melakukan unsur pelaksana otonomi daerah.
- 2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pitana (2009:123), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai :

- 1) *Koordinator*, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai kordinator diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata

merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

- 2) *Fasilitator*, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
- 3) *Stimulator*, peran Dinas Pariwisata sebagai *stimulator* adalah pemerintah dapat menciptakan strategi untuk membangun dan mengembangkan obyek dan daya tarik wisata.

2. Objek Wisata

a. Pengertian Objek Wisata

Obyek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (something to see). Di luar negeri obyek wisata disebut tourist attraction (atraksi wisata), sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan objek wisata (Pitana, 2009:120)

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.24/1979 Objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk Dikunjungi.

b. Jenis-jenis wisata

Pada pengembangan pariwisata terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau sebagai potensi yang perlu dikembangkan pada tujuan daerah wisata. Potensi ini berpengaruh dengan motivasi wisatawan yang akan menarik untuk datang berkunjung ke lokasi objek wisata tersebut. Adapun berbagai jenis pariwisata berdasarkan motif perjalanan wisata Pitana, (2009:51) yaitu:

- 1) Wisata budaya, motifasinya untuk mengetahui dan mempelajari kebudayaan tertentu.
- 2) Wisata perjalanan, umumnya berpergian menikmati keindahan alam.
- 3) Wisata kesehatan dan rekreasi, motifasinya mengunjungi lokasi untuk bersantai dan menikmati serta menyegarkan wisatawan akan kondisi jasmani dan rohani.
- 4) Wisata olahraga, motifasinya untuk berolahraga seperti mendaki gunung, berburu, atau ikut serta dalam kegiatan olahraga seperti Olympiade.
- 5) Wisata komersil untu urusan dagang, motifasinya mengunjungi pameranpameran atau pekan raya atau festival yang bersifat komersial menyangkut kebutuhan atau profesi dari wisatawan tersebut.
- 6) Wisata maritim, motivasinya menyaksikan keindahan laut, pantai, sungai dan danau.

c. Tata kelola kepariwisataan yang baik

Keberadaan sektor pariwisata dalam suatu wilayah dapat memberikan dampak positif maupun negative. Namun, pada dasarnya tergantung pada manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dari unsur pemerintah-industrimasyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Pencapaian tujuan dan misi pembangunan kepariwisataan yang baik, berkelanjutan (*sustainable tourism*) dan berwawasan lingkungan hanya akan dapat terlaksana manakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui tata kelola kepariwisataan yang baik (*good tourism governance*) (Yoeti, 2006:140). Wahab (2004:10), mengemukakan bahwa: prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta/ industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terkait. Selanjutnya Wahab (2004:9), menjelaskan bahwa secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan sehingga terciptanya *good tourism governance* akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Partisipasi Masyarakat Terkait

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya (Wahab, 2004:10).

2) Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bidang pariwisata, kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi industri wisata, Asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan (Wahab, 2004:10).

3) Kemitraan Kepemilikan Lokal

Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan serta hotel, restoran, cinderamata, transportasi wisata. Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui model kemitraan yang strategis (Wahab, 2004:10).

4) Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku (Wahab, 2004:11).

5) Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara: pengunjung/ wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik. Misalnya kerja sama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran (Wahab, 2004:11).

6) Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi

daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada (Wahab, 2004:11).

7) Monitor dan Evaluasi Program

Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan (Wahab, 2004:11).

8) Akuntabilitas Lingkungan

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada (Wahab, 2004:11).

9) Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *professional* (Wahab, 2004:11).

10) Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter *lansekap (sense of place)* dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan (Wahab, 2004:11).

3. Pengembangan Obyek Wisata

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2003) pengembangan merupakan perbuatan (hal, cara, usaha) mengembangkan. Suwanto (2004:112), mengemukakan Pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada :

- 1) Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.
- 2) Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal.
- 3) Berorientasi pada pengembangan wirausaha skala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berpotensi pada teknologi komparatif.

- 4) Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Yoeti (2006:143) menjelaskan tentang pengertian pengembangan pariwisata dengan membagi menjadi 2 kelompok yaitu pengembangan produk baru dan pengembangan atraksi wisata.

- 1) Pengembangan produk baru

Pengembangan suatu produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan atau menambah jenis produk yang dihasilkan ataupun yang akan dipasarkan. Pengembangan produk baru meliputi perbaikan pelayanan (service) semenjak seorang wisatawan meninggalkan tempat kediamannya sampai ke tempat atau obyek yang dituju sampai kembali ke tempat asalnya

- 2) Pengembangan atraksi wisata

Atraksi wisata adalah peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara periodik, baik yang bersifat tradisional maupun dilembagakan dalam kehidupan masyarakat modern, mempunyai daya tarik tertentu sehingga merangsang wisatawan untuk menyaksikan atau menghidirinya. Pengembangan atraksi wisata berarti menggali dan memajukan sesuatu yang dapat disaksikan oleh wisatawan sehingga mereka berminat untuk mengadakan kunjungan ke suatu daerah tujuan wisata. Atraksi wisata tersebut antara lain : upacara selamatan, pembakaran mayat, kesenian tradisional, dan sebagainya.

3) Usaha Pengembangan Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan membawa banyak manfaat dan keuntungan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu mengalahkan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui usaha pengembangan dan pemanfaatan berbagai potensi kepariwisataan.

4. Fungsi dinas pariwisata

Fungsi Dinas Pariwisata menurut Dinas Pariwisata Natuna (2015) adalah :

- 1) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi keuangan, umum dan kepegawaian.
- 2) Penyusunan program di bidang pariwisata.
- 3) perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pariwisata.
- 4) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang destinasi dan pemasaran pariwisata.
- 5) Penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pariwisata.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya

F. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah tahapan memberi batasan pengertian suatu istilah yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan berbagai kutipan teori-teori yang ada kemudian penulis mencoba menyimpulkan bahwa :

- a. Peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata adalah melakukan tugas pemerintah dengan mengelola obyek wisata dan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Secara spesifik adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata yang ada di daerah. Dengan berperan sebagai, koordinator, Fasilitator, dan Stimulator
- b. Tatakelola pariwisata yang baik adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta/ industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terkait
- c. Pengembangan adalah perbuatan (hal, cara, usaha) mengembangkan, memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin Objek wisata adalah adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi (Peraturan Pemerintah No.24/1979)

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

a. Peran Dinas Pariwisata

- 1) Koordinator :
 - a. Pengelolaan kegiatan pariwisata
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi
- 2) Fasilitator :
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan
 - b. Menciptakan strategi promosi wisata.
- 3) Stimulator :
 - a. Memberikan pelatihan kepada masyarakat
 - b. Memberikan kemudahan bagi investor

b. Tata kelola kepariwisataan yang baik

- 1) Partisipasi masyarakat terkait
- 2) Keterlibatan segenap pemangku kepentingan
- 3) Kemitraan kepemilikan lokal
- 4) Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan
- 5) Mengakomodasikan aspirasi masyarakat
- 6) Daya dukung lingkungan

- 7) Monitor dan evaluasi program
- 8) Pelatihan kepada masyarakat terkait

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif Kualitatif*. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan *kualitatif* adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya secara mendalam, rinci dan tuntas.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2011:11) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa obyek diantaranya di lingkungan Dinas

Pariwisata Kabupaten Natuna serta kondisi alamiah di beberapa obyek wisata yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong (2011:138)

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
- c. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Natuna dengan interpretasi yang tepat, serta akan mempelajari masalah yang terjadi di lapangan, termasuk didalamnya adalah kegiatan, pandangan, sikap, serta proses yang berlangsung dalam pengembangan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, selain itu penelitian ini juga akan dilakukan di beberapa obyek wisata yang terletak di Kabupaten Natuna untuk kepentingan observasi lanjutan. Sedangkan pengambilan data penelitian mulai dilakukan pada bulan November 2016 s/d selesai pada periode tahun 2015.

3. Unit Analisa Penelitian

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna
2. Kabid Destinasi Wisata
3. Wisatawan
4. Pemilik hotel dan restoran
5. Pedagang di objek wisata
6. Masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata

4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini subjek penelitian dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan berusaha memasukkan ciri-ciri tertentu terhadap responden menurut kehendak peneliti sebanyak 6 orang, untuk wawancara dengan dengan wisatawan dan masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata diambil secara random. Tujuan penggunaan teknik ini untuk memperoleh informasi yang jelas

tentang bagaimana peranan Pariwisata dalam rangka mengelola potensi pariwisata di Kabupaten Natuna

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang di dapat dari arsip Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna meliputi profil organisasi, program kerja, tugas dan fungsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan sambil direkam sehingga data yang diperoleh dapat dikonfirmasi kembali. Wawancara dilakukan kepada 6 narasumber yaitu Kepala Dinas Pariwisata, Kabid Destinasi Wisata dan Wisatawan, pemilik hotel dan restoran, pedagang yang berjualan di objek wisata serta masyarakat yang tinggal di obyek wisata.

b. Dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa dokumen resmi, berupa arsip terkait dengan peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan potensi pariwisata, seperti data sarana prasarana, data jumlah pengunjung, rencana strategis Dinas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebagai dokumentasi pribadi, peneliti memiliki foto-foto tentang keadaan obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Natuna

c. Observasi

Awal observasi peneliti melihat kondisi sarana prasarana serta kegiatan yang berlangsung di lingkungan Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dan selanjutnya peneliti mengamati ketersediaan sarana prasarana di beberapa objek wisata di Kabupaten Natuna.

6. Teknik Analisis Data

Langkah –langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data :

a. Reduksi Data

Setelah peneliti mendapatkan data berupa catatan lapangan, yang berupa hasil wawancara lalu peneliti memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian peneliti susun secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

b. Kategorisasi

Peneliti memilah–milah setiap sesuatu dalam bagian–bagian yang memiliki kesamaan. Dalam setiap kategori diberi nama yang disebut label. Hal ini digunakan agar memudahkan dalam proses analisis dan agar tidak tertukar dengan yang lain.

c. Sintesisasi

Setelah peneliti melakukan kategorisasi data, lalu peneliti akan mensintesis antara satu kategori data yang didapatkan dengan yang lainnya agar mudah dipahami dan tidak tertukar.

d. Menyusun “ Hipotesis Kerja”

Hal ini dilakukan dengan jalan mermuskan suatu pertanyaan yang proporsional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori yang substantif (yaitu teori yang berasal dan berkaitan dengan data).